
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar

Afriantoni ¹⁾, Dian Agustina ²⁾, Kiki Agustian ³⁾, Alda Olyvia ⁴⁾

¹²³⁴⁾ Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: afriantoni_uin@radenfatah.ac.id
dianagustinapsht@gmail.com
Kikiagustian76@gmail.com
aldaolyvia4@gmail.com

Abstrak

Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar merupakan langkah strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pendidikan, seperti Kurikulum Merdeka, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Hasil menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar pemangku kepentingan, ketersediaan anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat dan sekolah. Meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan pelatihan guru, dan kurangnya infrastruktur masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan perencanaan matang, evaluasi berkelanjutan, dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulannya, implementasi kebijakan yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara signifikan, namun memerlukan komitmen dan kolaborasi yang konsisten dari berbagai pihak.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Sekolah dasar, Kebijakan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Peran Pemerintah.

Abstract

The implementation of government policies aimed at improving the quality of primary education is a strategic step toward creating superior human resources in the future. This study aims to analyze the effectiveness of educational policies such as the Merdeka Curriculum, teacher competency development, and the provision of educational facilities and infrastructure. The findings indicate that successful implementation is highly influenced by coordination among stakeholders, budget availability, and active participation from both the community and schools. Although the policies are well-designed, challenges such as unequal access to education, limited teacher training, and inadequate infrastructure remain major obstacles. Therefore, a holistic approach involving careful planning, continuous evaluation, and support from all levels of society is required. In conclusion, effective policy implementation can significantly improve the quality of primary education, but it demands consistent commitment and collaboration from various parties.

Keywords: Policy implementation, Elementary school, Education policy, Teachers and Education personnel, Role of government.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan tahap ketika rancangan program pemerintah benar-benar dijalankan di lapangan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada fase ini, penyelenggara tidak sekadar mengeksekusi rencana, tetapi juga menyesuaikannya dengan kondisi nyata sekolah dan kebutuhan peserta didik. Secara umum, implementasi berfungsi sebagai jembatan antara regulasi yang telah disahkan dan kelompok sasaran, sehingga aturan dapat terasa efektif bagi masyarakat. Setelah perumusan selesai, tahap ini—yang dapat berlangsung dalam rentang pendek, menengah, maupun panjang—menjadi krusial karena di sinilah kebijakan diuji relevansi serta konsistensinya. Intinya, kebijakan adalah wujud otoritas negara dalam menata kepentingan publik dengan tetap mengutamakan aspek keamanan, kesehatan, moral, dan kesejahteraan (Mulyadi, 2015).

UU No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS menegaskan tiga tantangan pokok pendidikan di Indonesia: (1) menjaga capaian pembangunan pendidikan yang sudah ada, (2) menyiapkan manusia unggul yang mampu bersaing di pasar kerja global, serta (3) menyesuaikan sistem pendidikan nasional dengan semangat otonomi daerah agar proses belajar lebih demokratis, menghargai keberagaman, memenuhi kebutuhan lokal, dan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada hakikatnya, pendidikan bertujuan membekali peserta didik agar mereka dapat hidup produktif di tengah masyarakat, meningkatkan kualitas diri, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Wawasan tentang pendidikan sekolah dasar pun harus terus diperbarui, mengingat konsep dan praktiknya bersifat dinamis, mengikuti perubahan zaman dan peradaban (Mubarak, 2013).

Karena itu, pelaksanaan kebijakan menjadi kunci peningkatan mutu pendidikan. Program-program yang dilaksanakan harus menjaga dan mengembangkan kualitas secara berkelanjutan. Dampaknya luas: siswa yang menikmati layanan pendidikan bermutu umumnya menunjukkan prestasi akademik lebih tinggi; pada skala makro, hal ini melahirkan tenaga kerja terampil dan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditempuh dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berupaya menangkap pengalaman subjek secara menyeluruh dalam lingkungan alaminya, lalu memotret temuan tersebut lewat uraian kata-kata (bukan angka). Sumber data dikaji lewat ragam teknik alami—studi literatur, observasi non-eksperimental, serta telaah dokumen—sehingga konteks asli tetap terjaga (Moleong, 2018). Singkatnya, metode kualitatif deskriptif berfokus pada pelukisan apa adanya terhadap peristiwa atau objek studi sesuai situasi saat riset berlangsung; peneliti tidak memanipulasi variabel, melainkan memaparkan kenyataan sebagaimana terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada empat faktor kunci: komunikasi yang jelas, kecukupan sumber daya, sikap (disposisi) pelaksana, dan desain struktur birokrasi. Agar kebijakan benar-benar mewakili kepentingan publik, suara masyarakat harus mengisi proses pengambilannya. Berangkat dari itu, Nugroho memetakan tiga tahap strategis dalam siklus kebijakan, yakni: (1) perumusan, (2) implementasi, dan (3) evaluasi (Nugroho, 2003).

Faktanya, kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan saat dirancang, melainkan diuji justru ketika dijalankan. Tahap implementasi kerap lebih rumit ketimbang perumusan; banyak kebijakan kandas karena sulit diterapkan. Pada fase ini, pembuat kebijakan berusaha memengaruhi perilaku birokrat agar mau memberikan layanan sekaligus mengarahkan kelompok sasaran—sehingga tujuan program tercapai (Subarsono, 2005).

Kebijakan pemerintahan Indonesia dalam meningkatkan kualitas mutu Pendidikan

Kebijakan pendidikan merujuk pada serangkaian keputusan strategis—baik oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan—yang bertujuan memperluas kesempatan belajar sekaligus mengangkat mutu pendidikan nasional. Cakupannya luas: penataan kurikulum, perbaikan metode pengajaran, peningkatan kompetensi pendidik, pengadaan sarana-prasarana, hingga sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Inti sasaran kebijakan ini ialah memastikan setiap warga mendapatkan layanan pendidikan bermutu secara adil, sekaligus membentuk individu berketerampilan dan berpengetahuan cukup untuk berhasil di kehidupan

profesional. Dari perspektif makro, kebijakan pendidikan juga diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang mendorong laju perekonomian.

Pada jenjang sekolah dasar, pemerintah telah menggulirkan berbagai program: penekanan literasi serta numerasi, pelatihan dan pendampingan guru, digitalisasi proses belajar, penguatan kurikulum beserta sistem asesmen, pemerataan akses bagi daerah tertinggal, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah. Inisiatif-inisiatif inilah yang diharapkan dapat mengerek kualitas pendidikan dasar secara menyeluruh.

1. Peningkatan Kualitas Guru dan Kepala Sekolah

- b) Pelatihan dan Pengembangan Profesi: Pemerintah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pengembangan profesi untuk guru, termasuk In House Training dan buku pegangan guru.
- c) Meningkatkan Kompetensi: Guru dan kepala sekolah diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan lanjut, seminar, dan workshop.

2. Kolaborasi dan Pembinaan Antar Sekolah

- a) Pertukaran Guru dan Siswa: Pemerintah mendorong kolaborasi antar sekolah, termasuk sekolah TK-SD-SMP-SMA, serta sekolah informal, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- b) Pembinaan Guru dan Kepala Sekolah: Pemerintah memberikan pembinaan dan dukungan kepada guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kepemimpinan mereka.

3. Pengembangan Kurikulum dan Penilaian

- a) Merdeka Belajar: Pemerintah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar yang memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa.
- b) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM): Pemerintah mengembangkan AKM untuk mengukur kompetensi dasar siswa, termasuk literasi dan numerasi.
- c) Penilaian Pembelajaran: Pemerintah mendorong penilaian pembelajaran yang berkelanjutan dan relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai.

4. Digitalisasi Sekolah

- a) Platform Pendidikan Nasional: Pemerintah membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi untuk mendukung pembelajaran daring dan meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan.
- b) Penggunaan Teknologi: Pemerintah mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan e-learning, aplikasi pendidikan, dan media sosial.

5. Pemerataan Akses Pendidikan

- a) Bantuan Pendidikan: Pemerintah memberikan bantuan pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak.
- b) Membangun Sekolah di Daerah Terpencil: Pemerintah juga membangun sekolah di daerah terpencil dan memperluas akses pendidikan ke berbagai daerah.

6. Meningkatkan Kualitas Proses Belajar Mengajar

- a) Efektivitas Proses Belajar Mengajar: Pemerintah mendorong peningkatan efektivitas proses belajar mengajar, termasuk penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan penggunaan media pembelajaran yang menarik.
- b) Kepemimpinan yang Kuat: Pemerintah mendorong kepala sekolah untuk memiliki kepemimpinan yang kuat dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

7. Pengawasan dan Evaluasi:

- a) Evaluasi Pembelajaran: Pemerintah perlu melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala dan relevan untuk mengetahui efektivitas program dan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah maupun lembaga terkait, dengan tujuan untuk mengatur serta meningkatkan mutu sistem pendidikan agar sejalan dengan tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Winarsih (, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan penting yang bersifat strategis dan mengikat secara luas, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Sementara itu, Hamidah mengartikan kebijakan publik sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, bersifat wajib, serta disertai konsekuensi hukum bagi setiap pelanggaran yang ditetapkan dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang secara terbuka.

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, pemerintah bersama lembaga terkait menjalankan berbagai program dan kegiatan yang membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai unsur, seperti masyarakat, sektor industri, hingga organisasi non-pemerintah. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari kebijakan publik yang berlaku.

Ketika merancang kebijakan pendidikan, berbagai aspek penting turut diperhitungkan, mulai dari kebutuhan masyarakat, kondisi ekonomi nasional, hingga ketentuan hukum yang ada. Peran kebijakan publik menjadi krusial dalam menentukan arah pengambilan keputusan, terutama dalam hal pendanaan, peraturan teknis, dan mekanisme pengawasan. Selama tahap implementasi, pemerintah dan institusi terkait harus memastikan seluruh program pendidikan sejalan dengan kerangka kebijakan publik yang telah disepakati. Jika terjadi ketidaksesuaian antara keduanya, maka perlu dilakukan penyesuaian agar kebijakan pendidikan tetap berada dalam jalur kebijakan publik.

Lebih lanjut, proses evaluasi terhadap kebijakan pendidikan pun tidak terlepas dari peran kebijakan publik. Evaluasi ini penting untuk mengukur seberapa jauh tujuan dan target kebijakan pendidikan tercapai. Hasil dari evaluasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pendidikan selanjutnya, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan publik di sektor pendidikan. Dengan demikian, hubungan antara kebijakan pendidikan dan kebijakan publik bersifat timbal balik dan saling menguatkan demi tercapainya tujuan pendidikan serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan yang berkualitas yang berkaitan erat dengan pembangunan sampai saat ini masih menjadi tugas berat bagi pemerintah kita. Namun begitu, penjaminan mutu pendidikan sebagai wujud pengimplementasian amanat pembukaan UUD RI 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah mulai menjadi perhatian. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya berbagai kebijakan yang sudah disahkan oleh pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan bagi warga negaranya salah satunya dengan menjalankan kebijakan penjaminan mutu terpadu yang menyempurnakan penjaminan mutu terpisah sebelumnya.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah melalui sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP). Sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 2, bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sementara tujuan dari adanya SPMP adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan UUD RI 1945.

Ada pun bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan diantaranya Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan dan pengurangan kesenjangan

pendidikan di seluruh negeri. Program ini diresmikan dengan tujuan utama untuk memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan ekonomi (Nurkamiden, 2021). Dilatarbelakangi oleh realitas bahwa banyak keluarga di Indonesia masih berjuang untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, Program Indonesia Pintar menjadi strategi pemerintah untuk mengintervensi secara langsung dalam masalah ini. PIP menjadi solusi bagi ribuan siswa yang risiko putus sekolahnya tinggi karena alasan finansial. Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah tiga lipat:

1. Mengurangi Angka Putus Sekolah: Dengan memberikan bantuan finansial, PIP bertujuan untuk menurunkan jumlah anak yang terpaksa berhenti sekolah karena orang tua mereka tidak mampu menanggung biaya Pendidikan.
2. Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas: Program ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
3. Peningkatan Partisipasi Siswa dalam Pendidikan: Dengan memberikan keamanan finansial, PIP berupaya untuk meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Implementasi Program Indonesia Pintar dilakukan melalui distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang memungkinkan siswa untuk membeli seragam sekolah, buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah lainnya. Penerimaan KIP diatur melalui sistem yang memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan Program Indonesia Pintar, harapan yang diusung adalah pembentukan generasi masa depan yang lebih terdidik dan terampil. Anak-anak yang dulunya mungkin terpaksa meninggalkan bangku sekolah sekarang memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan akhirnya memberi kontribusi pada masyarakat dan ekonomi Indonesia. Melalui narasi ini, jelaslah bahwa Kebijakan Program Indonesia Pintar adalah langkah strategis pemerintah dalam memerangi ketidaksetaraan pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu siswa saat ini tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan sosial dan ekonomi negara di masa depan.

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Dalam ranah kebijakan publik, istilah implementasi bukanlah hal asing. Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan—suatu tindakan nyata untuk mewujudkan rencana atau kebijakan tertentu. Webster bahkan menjelaskannya secara lebih praktis sebagai tindakan menyediakan sarana agar sesuatu dapat dilaksanakan serta memberi dampak nyata terhadap suatu keadaan. Dari sini, kita bisa menarik pemahaman bahwa implementasi bukan sekadar melaksanakan, tetapi juga mensyaratkan adanya dukungan sarana dan tujuan yang jelas agar mampu menghasilkan perubahan yang signifikan.

Dalam konteks kebijakan, implementasi adalah tahapan krusial yang berfungsi sebagai jembatan antara rancangan di atas kertas dan dampaknya di lapangan. Ia menjadi penentu apakah kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar sampai kepada kelompok sasaran. Dalam skema kebijakan publik, implementasi muncul setelah perumusan kebijakan, dan berlangsung dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang, tergantung skala program dan kompleksitas masalah yang ditangani.

Menariknya, implementasi kebijakan pendidikan tidak bisa dipahami secara sempit hanya sebagai tugas administratif dari lembaga pendidikan atau pemerintah. Lebih jauh, ia melibatkan banyak unsur eksternal seperti faktor hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Semua itu, secara langsung maupun tidak, berpengaruh pada bagaimana kebijakan diterjemahkan di lapangan oleh berbagai pihak yang terlibat, baik guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa itu sendiri.

Wahab (2015) menggarisbawahi bahwa kebijakan sejatinya adalah instrumen kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan publik, termasuk dalam membatasi kepentingan individu demi tujuan kolektif seperti keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Artinya, ketika negara merumuskan kebijakan pendidikan, yang sejatinya dilakukan adalah mengarahkan masyarakat pada satu cita-cita bersama, yaitu pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan inklusif.

Implementasi kebijakan pendidikan di berbagai daerah bisa sangat beragam, tergantung pada nilai lokal dan prioritas yang ditentukan. Sebagai contoh, di Kabupaten Aceh Barat, pendekatan implementatif yang diambil lebih menekankan pada pembangunan karakter siswa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh H. Cut Aswadi, S.Ag., M.Pd, dalam wawancara yang menyebutkan bahwa: “Kita di sini kalau pendidikan, yang paling ditekankan adalah perbaikan karakter. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan sendiri menjadi pihak yang sangat mendukung program pendidikan karakter dari pemerintah” (Wawancara, 14 Mei 2021).

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana pemerintah daerah menjadikan pendidikan karakter sebagai titik tekan dalam kebijakan mereka. Dalam konteks ini, peran Dinas Pendidikan sangat penting, tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi sebagai aktor utama yang menjaga agar nilai-nilai kebijakan tetap terjaga di tengah realitas sosial yang terus berubah.

Dari sisi konstitusi, hak atas pendidikan telah menjadi bagian dari amanat negara yang sangat fundamental. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan utama berdirinya negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Dari dua kutipan konstitusi ini, kita dapat menarik dua kesimpulan penting:

1. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa.
2. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam kaitannya dengan hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat juga menjamin akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pasal 6 Ayat (1) dari UU ini menegaskan bahwa para penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, mulai dari jenjang dasar hingga tinggi. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh diskriminatif dan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, apapun latar belakang fisik atau sosialnya.

Sementara itu, untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga, pendekatan supervisi akademik menjadi penting. Dalam hal ini, Siregar (2020) menyampaikan bahwa bimbingan serta bantuan yang diberikan kepada guru berperan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Melalui supervisi, guru dapat terus meningkatkan cara mengajar mereka dan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Dengan demikian, mutu pendidikan di sekolah-sekolah negeri pun dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Jika kita ingin mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, maka salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Yaitu:

1. Komunikasi: Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain. Dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila mereka yang merasakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan para pelaksana peraturan tersebut.

2. Sumber Daya: Hal ini harus dilakukan dengan cermat, jelas dan konsisten, jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan cenderung tidak berjalan. Sumber daya adalah para pelaksana kebijakan dimana hal ini memiliki para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Disposisi/ Sikap: Disposisi adalah sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, khususnya aparatur birokrasi. Disposisi implementor adalah variabel yang digunakan untuk mengetahui sikap dan pemahaman pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang ada. Disposisi dalam melaksanakan kebijakan dapat dilihat dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis.
4. Birokrasi: Struktur birokrasi menunjukkan jalur hubungan antar unit kerja. Struktur birokrasi menunjukkan siapa yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya. Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Jadi, dapat disimpulkan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan kualitas pendidikan harus melalui tahapan yang sangat penting karena melaksanakan sebuah peningkatan didalam proses pendidikan memiliki proses yang tidak mudah dan harus memiliki sumber daya yang bijak dalam mencapai tujuan dari kualitas pendidikan.

Ali Imron mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh berbagai faktor strategis. Pertama, tingkat kompleksitas kebijakan itu sendiri. Semakin kompleks isi kebijakan, semakin sulit pula untuk diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Kedua, rumusan masalah dan alternatif solusi dalam kebijakan haruslah jelas. Jika tidak, para pelaksana akan kesulitan menerjemahkan maksud kebijakan ke dalam bentuk tindakan nyata. Ketiga, keberadaan sumber daya yang memadai—baik sumber daya manusia, dana, maupun sarana prasarana—menjadi penentu penting keberhasilan implementasi.

Keempat, kompetensi dari pelaksana kebijakan juga memegang peranan vital. Kebijakan yang baik tidak akan berdampak apa-apa jika dijalankan oleh sumber daya manusia yang kurang terlatih atau tidak memahami substansi kebijakan tersebut. Kelima, tingkat dukungan dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan juga menentukan apakah kebijakan tersebut diterima atau justru ditolak. Terakhir, efektivitas dan efisiensi birokrasi menjadi faktor penentu lainnya. Sebuah birokrasi yang lambat, tidak transparan, atau tidak responsif hanya akan menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan, sebaik apa pun rancangan awalnya.

Pandangan Ali Imron tersebut juga sejalan dengan model implementasi kebijakan yang menekankan pada empat komponen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (kemauan atau sikap pelaksana), serta struktur birokrasi. Keempatnya membentuk satu kesatuan yang harus berjalan harmonis. Komunikasi memastikan pesan kebijakan tersampaikan secara jelas ke semua level. Sumber daya menjamin bahwa pelaksana memiliki modal untuk menjalankan kebijakan. Disposisi berhubungan dengan komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi menentukan sejauh mana proses bisa berlangsung efisien.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pendidikan tidak berlangsung secara instan. Ada beberapa tahap yang perlu dilalui agar proses implementasi berjalan efektif. Dimulai dari perencanaan, yaitu tahap menyusun kebijakan secara sistematis dan realistis. Lalu berlanjut ke tahap pelaksanaan, di mana kebijakan mulai diterapkan di lapangan sesuai dengan pedoman dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah tahap pengawasan, yang bertujuan memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari kebijakan awal. Terakhir adalah evaluasi, yaitu proses menilai sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya serta memberikan dampak nyata terhadap sasaran yang dituju.

Ketika kita bicara tentang peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Sekolah Dasar, penting untuk dipahami bahwa keberhasilan peserta didik tidak mungkin dicapai hanya dari satu sisi saja. Pendidikan dasar merupakan fondasi yang menentukan arah pendidikan ke jenjang

berikutnya. Oleh karena itu, kolaborasi semua komponen dalam ekosistem sekolah sangat dibutuhkan—mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, hingga peserta didik itu sendiri.

Mutu pendidikan dasar dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya. Beberapa di antaranya seperti pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung minat dan bakat siswa, penambahan jam pelajaran untuk penguatan materi, serta pelaksanaan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam konteks ini, UF—salah satu kepala sekolah—mengungkapkan bahwa: “Untuk peningkatan mutu pendidikan itu, antara lain, di sekolah kita melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Kalau kita, ya, Kurikulum 2013 itu benar-benar dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu di sini ada ekstra wajib, ada TI, TPA, dan Bahasa Inggris. Semua itu digunakan untuk peningkatan mutu. Kemudian, kelas VI ada tambahan jam pelajaran, dan dari kelas I sampai VI diterapkan oleh gurunya masing-masing.” (Wawancara, 3 Maret 2017) (Suryani, 2021).

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan peningkatan mutu tidak hanya berhenti pada dokumen formal, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam program konkret yang dijalankan oleh pihak sekolah. Ini menjadi bukti nyata bagaimana implementasi yang terencana dan didukung oleh semua pihak mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan proses yang memiliki banyak sisi yang melibatkan beberapa elemen penting. Faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk memberlakukan kebijakan memahami peran mereka dan peraturan dengan jelas, sehingga mendorong penerapan aturan secara konsisten.

Sumber daya yang memadai, baik dalam hal sumber daya manusia maupun dukungan material, sangat penting untuk melaksanakan peningkatan pendidikan dengan sukses. Sikap atau watak pelaksana kebijakan, khususnya birokrat, memegang peranan penting dalam menentukan seberapa baik kebijakan tersebut dilaksanakan. Komitmen, konsistensi, dan pendekatan demokratis mereka sangat memengaruhi hasil penerapan kebijakan. Selain itu, struktur birokrasi menentukan jalur tanggung jawab dan wewenang, yang sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan diperlukan perhatian cermat terhadap komponen-komponen ini dan pendekatan terstruktur untuk membina lingkungan yang kondusif bagi kemajuan pendidikan.

REFERENSI

- Alfirzen. “Kebijakan Pendidikan Serta Implementasi Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2021: 1521-1529.
- Darma, S. H., & Wulandari, D. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Berkarakter di Kabupaten Purwakarta. .” *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, , 2022.
- Erica, D., Haryanto, H., Rahmawati, M., & Vidada, I. “Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Pandangan Islam.” *Perspektif Pendidikan dan Keguruan*, 2019: 8-22.
- Hamidah, D. “Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik.” *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, n.d.: 34-44.
- Hasbullah, H. S. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektiv Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

- Imran, Ali. *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia: Proses, Produk, Dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- J., Moleong. L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mubarak, Ruma. “Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar.” *Madrassa*, 2013: 2.
- Muchlis. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mulyadi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, 2015.
- Nugroho, D. R. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex M.K, 2003.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Karlina, Y., & Yumriani. “Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan.” *Al-Urwatul Wutqa*, 2022: 1-8.
- Siregar, D. “Peningkatan Mutu Pembelajaran Dengan Pendekatan Pakem Guru Kelas V Dan Vi Melalui Supervisi Kelas Di SDN. 118267.” *Jurnal Bahasa Indonesia Prima*, 2019: 74-81.
- Solihin, Abdul Wahab. *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryani, I. “Implementasi Kebijakan Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” *Jurnal Gentela Pendidikan Dasar*, 2021: 65-82.
- Wahab, Sholichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, 2015.
- Winarsih, Sri. “Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” *Cendikia*, n.d.: 51-66.
- Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2023: 545-551.